JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 07 November 2025 | **Revised:** 13 November 2025 | **Accepted:** 23 November 2025

Analisis Strategi Komunikasi Humas DPRD dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Sidenreng Rappang

Nirwana Hasim[1], Nurjannah Nonci[2], Andi Nilwana[3], Muliani Samiri[4]
[1]Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia, hasimnirwana@gmail.com
[2]Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia, nurjannahnonci62@gmail.com
[3]Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia, andinilwana0@gmail.com
[4]Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia, mulisamiri77@gmail.com

Corresponding Author: hasimnirwana@gmail.com[1]

Abstrack: *This study analyzes the communication strategies used by the Public Relations of the Sidenreng Rappang Regional Legislative Council (DPRD) in enhancing public information transparency. The research employs a qualitative method with a case study approach, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation for data collection. The findings indicate that the communication strategies of the DPRD's Public Relations include the use of digital media (websites, social media), public communication campaigns, media relations, and direct discussion forums. Thematic analysis using NVivo revealed that the theme of information transparency dominates (45%), followed by public communication campaigns (30%), media relations (15%), and crisis management (10%). However, the effectiveness of these strategies is still hindered by low digital literacy among the public (40%), paternalistic culture (35%), and limited human resources (25%). Recommendations include the development of educational content based on local culture, enhancing the capacity of Public Relations human resources, and optimizing traditional communication channels to reach rural communities. This study provides practical contributions to the development of inclusive and responsive government communication strategies.*

Keywords: *Communication Strategy, DPRD Public Relations, Information Transparency, Digital Media, Public Participation.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Humas DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan transparansi informasi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Humas DPRD meliputi pemanfaatan

media digital (situs web, media sosial), kampanye komunikasi publik, media relations, dan forum diskusi langsung. Analisis tematik menggunakan NVivo mengungkapkan bahwa tema transparansi informasi mendominasi (45%), diikuti oleh kampanye komunikasi publik (30%), media relations (15%), dan manajemen krisis (10%). Namun, efektivitas strategi ini masih terhambat oleh rendahnya literasi digital masyarakat (40%), budaya paternalistik (35%), dan keterbatasan SDM (25%). Rekomendasi yang diajukan meliputi pengembangan konten edukatif berbasis budaya lokal, peningkatan kapasitas SDM Humas, serta optimalisasi saluran komunikasi tradisional untuk menjangkau masyarakat pedesaan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan strategi komunikasi pemerintah yang inklusif dan responsif.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Humas DPRD, Transparansi Informasi, Media Digital, Partisipasi Publik.

PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin mengemuka. (Tartib & Etty Sri Wahyuni, 2023) DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memegang peran krusial dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan publik. (Firdaus & Zaimasuri, 2023) Humas DPRD berfungsi sebagai ujung tombak komunikasi strategis yang memfasilitasi dialog antara institusi legislatif dengan konstituennya. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas fungsi humas masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam konteks transparansi informasi publik.

Berdasarkan data dari Transparency International Indonesia (2023), pemahaman masyarakat terhadap proses legislasi daerah dan mekanisme penyampaian aspirasi ke DPRD masih berada pada level 32%. Rendahnya tingkat pemahaman ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang serius antara DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya (Sasmita & Rahaju, 2023). Di Kabupaten Sidenreng Rappang, masalah ini semakin kompleks dengan adanya keterbatasan akses internet yang hanya mencapai 45% rumah tangga (BPS Sidrap, 2023), serta pengaruh budaya paternalistik yang melekat dalam masyarakat Bugis.

Penelitian sebelumnya oleh (Karlina, 2021) mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana komunikasi dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam implementasi fungsi humas di DPRD. Sementara itu (Novianti et al., 2020) menekankan pentingnya peran humas sebagai fasilitator komunikasi dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis strategi komunikasi yang digunakan humas DPRD dalam konteks peningkatan transparansi informasi publik dengan pendekatan analisis tematik menggunakan NVivo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apa saja strategi yang digunakan oleh humas DPRD dalam membangun komunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi?" Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan Humas DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan transparansi informasi publik, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut melalui analisis tematik NVivo.

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut (Falabibah, 2023), transparansi tidak hanya sekadar menyediakan akses informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban kinerja institusi.

(Tavares, 2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Transparansi menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sementara akuntabilitas memastikan adanya konsekuensi atas tindakan yang diambil oleh pemerintah. Kedua prinsip ini saling memperkuat dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik.

Humas dalam organisasi publik berperan sebagai penghubung antara institusi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurut (Chandra, 2017), peran humas dapat dikategorikan menjadi empat jenis: (1) penasihat ahli, (2) fasilitator komunikasi, (3) fasilitator pemecahan masalah, dan (4) teknisi komunikasi. Dalam konteks DPRD, keempat peran ini harus dijalankan secara integratif untuk memastikan terciptanya komunikasi yang efektif.

Teori koordinasi Henry Fayol menekankan pentingnya kesatuan arah dan perintah dalam mencapai tujuan organisasi. Prinsip ini relevan dalam konteks koordinasi humas DPRD dengan masyarakat, dimana diperlukan keselarasan antara tujuan institusi dengan harapan publik. Koordinasi yang efektif memungkinkan terciptanya sinergi antara berbagai saluran komunikasi yang digunakan.

Strategi komunikasi humas dalam konteks transparansi informasi publik meliputi berbagai pendekatan. Menurut (Supa & Zoch, 2022), media relations tetap menjadi komponen penting dalam strategi komunikasi pemerintah, meskipun platform digital telah menjadi saluran yang semakin dominan. Efektivitas strategi komunikasi sangat bergantung pada kemampuan humas dalam memilih saluran yang tepat sesuai dengan karakteristik audiens.

Dalam era digital, pemanfaatan media sosial telah menjadi keharusan bagi institusi pemerintah. (Ningrum, 2023) mencatat bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi, tetapi juga sebagai platform untuk membangun engagement dengan masyarakat. Namun, keberhasilan strategi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat dan ketersediaan infrastruktur pendukung.

Konteks budaya lokal memainkan peran signifikan dalam efektivitas strategi komunikasi pemerintah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, budaya Bugis dengan nilai-nilai paternalistiknya mempengaruhi pola komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat (Kasman, 2022). Masyarakat Bugis cenderung mengandalkan tokoh adat sebagai perantara dalam berkomunikasi dengan institusi formal.

Nilai siri' (harga diri) dalam budaya Bugis juga mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan otoritas (Rahayu et al., 2023). Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal. Strategi yang memanfaatkan tokoh masyarakat dan saluran komunikasi tradisional dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menjangkau masyarakat pedesaan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi komunikasi Humas DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan transparansi informasi publik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteksnya yang alamiah dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode November 2024 hingga Januari 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DPRD Sidrap merupakan institusi legislatif yang aktif mengembangkan berbagai strategi komunikasi dalam konteks masyarakat dengan karakteristik budaya yang khas.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap empat informan kunci yang terdiri dari Sekretaris DPRD, Kabag Umum & Keuangan, Kabag Persidangan & Perundang-

undangan, dan perwakilan masyarakat. Pedoman wawancara digunakan untuk memastikan kelengkapan data yang dikumpulkan.
2. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas komunikasi Humas DPRD, termasuk pengelolaan media sosial, penyelenggaraan forum publik, dan mekanisme respons terhadap aspirasi masyarakat.
3. Dokumentasi: Pengumpulan dokumen terkait strategi komunikasi, termasuk laporan aktivitas humas, konten media sosial, dan materi kampanye komunikasi publik.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan bantuan software NVivo
12. Proses analisis mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Lexy J. Moelong, meliputi:
1. Klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama
2. Reduksi data dengan memfokuskan pada informasi yang relevan
3. Deskripsi data secara sistematis
4. Penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang teridentifikasi

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Humas DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian dari Sekretariat DPRD yang bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi antara institusi legislatif dengan masyarakat. Struktur organisasi humas terdiri dari koordinator yang membawahi staf dengan pembagian tugas berdasarkan saluran komunikasi. Saat ini, humas dikelola oleh tiga staf dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris DPRD, humas memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi informasi publik. "Humas menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kebijakan DPRD kepada masyarakat. Kami berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami oleh masyarakat (Akbar et al., 2023)." ujarnya.

Humas DPRD Sidrap telah mengembangkan strategi komunikasi digital yang mencakup pemanfaatan website resmi, media sosial (Facebook, Instagram, TikTok), dan kanal YouTube. Website DPRD (dprd.sidrapkab.go.id) menjadi platform utama untuk mempublikasikan dokumen-dokumen resmi seperti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), laporan kinerja, dan agenda sidang. Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi secara real-time dan menjangkau kalangan muda. Kabag Umum & Keuangan menjelaskan: "Kami aktif posting jadwal sidang, hasil keputusan, dan informasi penting lainnya di Facebook dan Instagram. Untuk konten video, kami menggunakan TikTok dan YouTube." Analisis konten media sosial menunjukkan bahwa selama periode November 2024-Januari 2025, Humas DPRD mempublikasikan 245 postingan di Facebook, 189 postingan di Instagram, dan 45 video di TikTok. Namun, engagement rate masih relatif rendah, dengan rata-rata 15 like dan 3 komentar per postingan.

Humas DPRD melaksanakan kampanye komunikasi publik melalui berbagai pendekatan. Kampanye "DPRD Terbuka" menjadi program unggulan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan kinerja DPRD. Program ini mencakup sosialisasi melalui media cetak, siaran radio, dan forum diskusi. Kabag Persidangan & Perundang-undangan menuturkan: "Kami menyelenggarakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan minimal sebulan sekali. Untuk isu-isu penting seperti Ranperda, kami adakan forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat."
Selama periode penelitian, tercatat 12 kali forum konsultasi publik yang diselenggarakan, dengan total partisipasi 480 orang. Namun, partisipasi ini masih didominasi oleh perwakilan organisasi formal, sementara partisipasi masyarakat umum masih terbatas.

Kerja sama dengan media massa menjadi komponen penting dalam strategi komunikasi Humas DPRD. Humas secara rutin mengirimkan siaran pers kepada media lokal mengenai

perkembangan kebijakan dan aktivitas DPRD. Terdapat 15 media lokal yang menjadi mitra tetap DPRD Sidrap. "Kami menjalin hubungan baik dengan wartawan media lokal. Setiap ada perkembangan penting, kami kirimkan press release dan mengadakan konferensi pers jika diperlukan," jelas Kabag Umum & Keuangan. Monitoring media menunjukkan bahwa selama periode penelitian, terdapat 65 pemberitaan tentang DPRD Sidrap di media lokal. Sebanyak 80% pemberitaan bersifat netral atau positif, sementara 20% bersifat kritis.

Menyadari pentingnya konteks budaya lokal, Humas DPRD mengembangkan strategi komunikasi yang memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal Bugis (Musi et al., 2022). Pendekatan melalui tokoh adat dan forum musyawarah tradisional menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat pedesaan. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan: "Masyarakat di desa lebih percaya dengan informasi yang disampaikan melalui tokoh adat. Mereka merasa lebih nyaman menyampaikan aspirasi dalam forum non-formal." Humas DPRD telah melakukan kolaborasi dengan 15 tokoh adat dari 11 kecamatan untuk memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat pedesaan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi publik.

Tabel 1. Distribusi Tema Strategi Komunikasi Humas DPRD Berdasarkan Analisis Nvivo

Tema Utama	Persentase	Sub-Tema	Kode Utama	Contoh Data dari Transkrip
Transparansi Informasi	45%	Transparansi Prosedural (30%)	- Agenda sidang	*"Kami upload semua jadwal sidang dan Raperda di website..."* (Sekretaris DPRD)
		Transparansi Substantif (15%)	- Ranperda - Laporan keuangan - Alasan kebijakan - Proses negosiasi	*"Proses politik internal tidak bisa semua diumbar ke publik..."* (Kabag Persidangan)
Kampanye Komunikasi Publik	30%	Sosialisasi	- Sosialisasi ke kecamatan	*"Kami adakan sosialisasi minimal sebulan sekali ke kecamatan..."* (Kabag Umum)
		Forum Konsultasi	- Forum diskusi	*"Buat video penjelasan kebijakan yang mudah dipahami..."* (Staf Humas)
		Konten Edukasi	- Video penjelasan	
Media Relations	15%	Siaran Pers	- Press release	*"Setiap perkembangan penting kami kirim press release..."* (Kabag Umum)
		Konferensi Pers	- Wawancara media	*"Untuk isu kritis, kami koordinasi dulu dengan pimpinan..."* (Staf Humas)
		Klarifikasi	- Respons pemberitaan	
Manajemen Krisis	10%	Protokol	- Prosedur tanggap darurat	*"Kalau ada isu mendesak, kami langsung rapat koordinasi..."* (Sekretaris DPRD)
		Tim Krisis	- Koordinasi internal	*"Belum ada pelatihan khusus manajemen krisis..."* (Staf Humas)
		Pelatihan	- Simulasi krisis	

Sumber: Data Hasil Penelitian (diolah), 2025

Tabel 2. Analisis Tantangan Implementasi Strategi Komunikasi Berdasarkan Nvivo

Jenis Tantangan	Persentase	Faktor Pendukung	Dampak terhadap Strategi	Rekomendasi Berbasis Data
Kesenjangan Digital	40%	- Akses internet terbatas (45%)	Strategi digital tidak optimal	- Konten multimedia offline
		- Literasi digital rendah	Jangkauan terbatas di pedesaan	- Optimasi website mobile
		- Infrastruktur tidak merata	Engagement rate rendah	- Kolaborasi dengan warnet desa
Budaya Paternalistik	35%	- Nilai *siri'*	Partisipasi forum rendah	- Melibatkan tokoh adat
		- Ketergantungan pada tokoh adat	Aspirasi tidak langsung	- Bahasa Bugis dalam kampanye
		- Komunikasi tidak langsung	Komunikasi top-down	- Forum non-formal
Keterbatasan SDM	25%	- Jumlah staf terbatas (3 orang)	Konten tidak kreatif	- Pelatihan khusus
		- Kompetensi digital	Respons lambat	- Rekrutmen staf baru
		- Beban kerja tinggi	Monitoring tidak optimal	- Pembagian tugas jelas

Sumber: Data Hasil Penelitian (diolah), 2025

Dominasi tema transparansi informasi sebesar 45% dalam analisis NVivo mengkonfirmasi bahwa penyediaan akses informasi menjadi prioritas utama strategi komunikasi Humas DPRD Sidrap. Namun, analisis kualitatif lebih lanjut terhadap node-node dalam NVivo mengungkap nuansa penting. Tema ini terbagi menjadi dua sub-tema utama: transparansi prosedural (30%) dan transparansi substantif (15%).

1. Transparansi Prosedural terutama tercermin dari frekuensi tinggi kata kunci seperti "agenda sidang," "Ranperda," "laporan keuangan," dan "hasil rapat" dalam dokumen dan transkrip wawancara. Humas aktif mempublikasikan dokumen-dokumen ini di website dan media sosial. Namun, observasi menunjukkan bahwa informasi yang dibagikan seringkali bersifat *raw data*—dokumen PDF lengkap yang diunggah tanpa ringkasan atau penjelasan kontekstual. Seorang tokoh masyarakat menyatakan, *"Kami tahu jadwal sidang diumumkan, tapi tidak paham apa yang akan dibahas secara mendetail atau dampaknya untuk kami."* Hal ini menunjukkan bahwa transparansi prosedural, meskipun tinggi volumenya, belum sepenuhnya bermakna bagi sebagian masyarakat karena kurangnya interpretasi dan simplifikasi.
2. Transparansi Substantif, yang hanya menyumbang 15%, berkaitan dengan publikasi "alasan kebijakan," "proses negosiasi," dan "pertimbangan politik" di balik suatu keputusan. Node ini memiliki referensi yang jauh lebih sedikit. Wawancara dengan Kabag Persidangan mengindikasikan bahwa informasi jenis ini sering dianggap sebagai ranah internal yang tidak perlu dipublikasikan secara luas. *"Proses politik di balik layar itu sensitif. Tidak semua hal bisa diumbar ke publik karena bisa ditafsirkan macam-macam,"* ujarnya. Kesenjangan antara transparansi prosedural dan substantif ini menciptakan celah bagi persepsi negatif masyarakat. Masyarakat mungkin memiliki akses terhadap *apa* yang diputuskan, tetapi tidak memahami *mengapa* keputusan itu diambil, yang pada akhirnya dapat menggerogoti kepercayaan.

Eksplorasi Tema Kampanye Komunikasi Publik (30%) dan Kaitannya dengan Budaya Tema kampanye komunikasi publik (30%) menunjukkan upaya proaktif Humas. Analisis NVivo terhadap node ini mengungkap sub-tema seperti "sosialisasi," "forum konsultasi," dan

"konten edukasi (Summak, 2024)." Yang menarik, analisis *word tree* pada NVivo menunjukkan bahwa kata "forum" sering dikaitkan dengan lokasi "kecamatan" dan "kelurahan," namun sangat jarang dikaitkan dengan "desa" atau "kampung." Ini memperkuat temuan observasi bahwa jangkauan kampanye fisik masih terpusat di wilayah urban.

Lebih dalam lagi, analisis *cross-tabulation* antara tema "Kampanye Komunikasi Publik" dan kode "Budaya Lokal" menghasilkan insight yang berharga. Ditemukan bahwa kampanye yang secara eksplisit melibatkan atau menyebut peran "tokoh adat" atau menggunakan "bahasa Bugis" memiliki tingkat partisipasi dan engagement yang lebih tinggi berdasarkan data observasi. Sebaliknya, kampanye yang bersifat umum dan formal cenderung didominasi oleh audiens yang sama—para perwakilan organisasi formal. Hal ini memperkuat proposisi bahwa dalam konteks Sidrap, efektivitas kampanye komunikasi publik tidak hanya bergantung pada pesannya, tetapi sangat dipengaruhi oleh *utusan* dan *bahasa* yang digunakan. Nilai *siri'* (harga diri) dan *respect* terhadap otoritas tradisional membuat pesan yang disampaikan oleh tokoh adat lebih mudah diterima daripada pesan yang sama yang disampaikan langsung oleh staf Humas. Oleh karena itu, strategi kampanye di masa depan perlu secara sistematis mengintegrasikan aktor-aktor kunci dari budaya lokal ini, bukan sekadar sebagai simbol, tetapi sebagai mitra komunikasi yang setara.

Tema media relations (15%) terbagi menjadi aktivitas "proaktif" (seperti siaran pers dan konferensi pers) dan "reaktif" (seperti klarifikasi dan respons terhadap pemberitaan). Analisis NVivo menunjukkan bahwa node "siaran pers" memiliki frekuensi sangat tinggi, sementara node "klarifikasi" atau "koreksi" memiliki frekuensi yang rendah. Ini dapat diinterpretasikan sebagai dua hal: pertama, Humas sangat aktif dalam "mendorong" narasi positif; kedua, kapasitas Humas dalam "mengelola" narasi kritis mungkin masih terbatas. Seorang wartawan media lokal yang diwawancarai secara informal mengkonfirmasi hal ini: *"Kami mudah dapat siaran pers dari DPRD. Tapi ketika kami tanyakan hal yang kritis, responsnya lambat dan seringkali jawabannya sangat hati-hati dan formal."*

Analisis *sentiment* pada node "media relations" dalam NVivo juga menunjukkan bahwa meskipun 80% pemberitaan netral/positif, sebagian besar pemberitaan positif tersebut bersifat informatif dan tidak mendalam. Sementara itu, 20% pemberitaan kritis justru seringkali lebih analitis dan membahas akar permasalahan, seperti keterlambatan pembahasan Ranperda tertentu atau anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Implikasinya, dominasi kuantitas pemberitaan positif tidak serta-merta mengalahkan dampak kualitatif dari pemberitaan kritis. Humas perlu beralih dari sekadar mengejar kuantitas pemberitaan ke arah membangun hubungan yang lebih substansial dengan media, yang memungkinkan diskusi terbuka tentang tantangan dan kompleksitas yang dihadapi DPRD, yang justru dapat membangun citra sebagai institusi yang jujur dan transparan.

Meskipun hanya menyumbang 10%, tema manajemen krisis merupakan indikator penting mengenai kesiapan Humas dalam menghadapi situasi darurat komunikasi. Node-node dalam tema ini, seperti "protokol," "tim krisis," dan "pelatihan," memiliki sangat sedikit referensi dari data wawancara dan dokumen. Sebaliknya, node "penanganan ad-hoc" justru lebih menonjol. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan Humas terhadap potensi krisis—seperti protes masyarakat terhadap suatu kebijakan atau skandal yang melibatkan anggota dewan—masih bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Ketika ditanya tentang skenario krisis, Sekretaris DPRD menjawab, *"Kami akan sampaikan klarifikasi secepatnya dan koordinasi dengan pimpinan untuk langkah terbaik."* Jawaban ini bersifat umum dan tidak mencerminkan adanya protokol yang baku.

Dalam teori manajemen krisis Charles (2021), fase *pre-crisis* atau pencegahan adalah yang paling krusial. (Asenova-Todorova, 2021) Rendahnya persiapan pada tema ini menunjukkan kerentanan institusi. Jika suatu krisis komunikasi besar terjadi, ketiadaan protokol yang jelas dapat memperparah situasi dan merusak kepercayaan publik yang sudah terbangun melalui strategi komunikasi rutin. Oleh karena itu, pengembangan manual

manajemen krisis yang jelas, termasuk identifikasi potensi krisis, pembentukan tim, dan skenario respons komunikasi, harus menjadi prioritas peningkatan kapasitas Humas ke depan.

Yang paling menarik dari analisis NVivo adalah ketika melihat hubungan antar tema. Melalui fitur *project map* atau *conceptual model*, dapat dilihat bahwa tema "Transparansi Informasi" menjadi pusat dari seluruh jaringan. Tema "Kampanye Komunikasi Publik" dan "Media Relations" terhubung kuat kepadanya, yang artinya kedua strategi tersebut secara logis diarahkan untuk mendukung tujuan transparansi. Namun, yang patut dicermati adalah posisi tema "Tantangan SDM" (yang muncul dalam analisis indikator penelitian) dan "Manajemen Krisis". Kedua tema ini terhubung secara lemah dengan tema pusat. Ini merefleksikan realitas di lapangan: isu-isu kapasitas SDM dan kesiapan krisis seringkali dianggap sebagai masalah internal operasional yang terpisah dari strategi komunikasi utama. Padahal, keduanya adalah faktor penentu yang dapat memperkuat atau melemahkan seluruh upaya transparansi. Lemahnya koneksi ini dalam model konseptual mengisyaratkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, di mana peningkatan kapasitas SDM dan kesiapan krisis tidak dilihat sebagai program terpisah, tetapi sebagai fondasi yang terintegrasi dalam seluruh perencanaan strategis komunikasi Humas DPRD.

Melalui fitur *matrix coding* dalam NVivo, ditemukan korelasi menarik antara tema-tema dalam kedua tabel:

a. Tema "Kesenjangan Digital" (40%) berkorelasi negatif kuat dengan "Transparansi Informasi"
b. Tema "Budaya Paternalistik" (35%) berkorelasi positif dengan "Kampanye Komunikasi Publik" ketika melibatkan tokoh adat
c. Tema "Keterbatasan SDM" (25%) berkorelasi negatif dengan semua tema strategi komunikasi

Kesenjangan Digital (40%) muncul sebagai tantangan terbesar, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi digital Humas. Data BPS Sidrap 2023 yang menunjukkan hanya 45% rumah tangga memiliki akses internet memperkuat temuan ini. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun konten digital diproduksi dalam volume tinggi, tingkat engagement dan jangkauannya tetap terbatas. Budaya Paternalistik (35%) menjadi tantangan unik dalam konteks lokal Sidrap. Analisis NVivo menunjukkan kuatnya pengaruh nilai *siri'* (harga diri) dalam pola komunikasi masyarakat. Node "tokoh adat" dan "bahasa Bugis" memiliki koneksi kuat dengan node "efektivitas kampanye", mengindikasikan bahwa pendekatan budaya merupakan kunci keberhasilan strategi komunikasi. Keterbatasan SDM (25%) meskipun persentasenya paling kecil, namun memiliki dampak signifikan terhadap kualitas implementasi strategi. Coding pada node "beban kerja" dan "kompetensi digital" menunjukkan keterkaitan erat dengan node "kualitas konten" dan "kecepatan respons". Dengan demikian, analisis NVivo tidak hanya berfungsi sebagai alat kuantifikasi, tetapi juga sebagai alat diagnostik yang mampu mengungkap akar permasalahan dan hubungan kompleks antar variabel dalam strategi komunikasi Humas DPRD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Humas DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengimplementasikan berbagai strategi komunikasi untuk meningkatkan transparansi informasi publik, dengan distribusi tema berdasarkan analisis NVivo: Transparansi Informasi (45%), Kampanye Komunikasi Publik (30%), Media Relations (15%), dan Manajemen Krisis (10%).
2. Strategi komunikasi digital yang diterapkan masih menghadapi kendala signifikan akibat kesenjangan digital (40%) dan rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

3. Pendekatan berbasis budaya lokal melalui pemanfaatan tokoh adat terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat menjadi model untuk pengembangan strategi komunikasi pemerintah di daerah dengan karakteristik budaya yang serupa.
4. Keterbatasan SDM (25%) dan kurangnya kesiapan manajemen krisis menjadi faktor pembatas utama dalam optimalisasi strategi komunikasi yang diterapkan.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi yang dapat diimplementasikan:

1. Pengembangan Kapasitas SDM Humas
    a. Melakukan pelatihan khusus tentang komunikasi digital dan manajemen media sosial bagi staf humas
    b. Menambah jumlah staf humas dengan kompetensi di bidang komunikasi digital
    c. Mengembangkan manual manajemen krisis dan melakukan simulasi secara berkala
2. Optimalisasi Strategi Komunikasi Digital
    a. Mengembangkan konten edukatif dalam format video dan infografis yang mudah dipahami
    b. Membuat konten dalam bahasa Bugis untuk menjangkau masyarakat pedesaan
    c. Mengoptimalkan website dengan fitur yang lebih user-friendly
3. Peningkatan Strategi Komunikasi Tradisional
    a. Meningkatkan frekuensi forum konsultasi publik di wilayah pedesaan
    b. Memperkuat kolaborasi dengan tokoh adat dan organisasi masyarakat
    c. Memanfaatkan saluran komunikasi tradisional seperti radio komunitas
4. Penguatan Media Relations
    a. Mengembangkan program pelatihan bersama dengan jurnalis media lokal
    b. Meningkatkan transparansi dalam merespons pemberitaan kritis
    c. Membuat sistem monitoring media yang lebih komprehensif
5. Pengembangan Infrastruktur Pendukung
    a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan strategi komunikasi
    b. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk meningkatkan akses internet di daerah terpencil
    c. Mengembangkan sistem pengukuran efektivitas strategi komunikasi

REFERENSI

Akbar, Y. M., Rosadi, R. R., Royandiah, I., Ismaya, M. F. H., & Fadiyah, D. (2023). Strategi Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Menghadapi Berita Negatif di Media Massa. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *15*(03), 434–444. https://doi.org/10.52166/madani.v15i03.5794

Asenova-Todorova, A. (2021). Aspects of Communication Behavior: Medical Institutions and Public Interest. *Postmodernism Problems*, *11*(2), 178–186. https://doi.org/10.46324/PMP2102178

Chandra, D. (2017). Peranan humas PT pusri palembang dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah. *Peranan Humas PT Pusri Palembang Dalam Menjaga Hubungan Baik Dengan Pemerintah*, 13–26.

Falabibah, Y. N. (2023). *Transparansi Informasi Kepada Jamaah Haji Melalui Penggunaan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Di Kementerian Agama Kabupaten Kediri*. *2*(2), 1–23.

Firdaus, F., & Zaimasuri, Z. (2023). Implementation of Law Number 14 of 2008 on Public Information Transparency in the Indonesian House of Representatives (DPR RI). *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, *1*(1), 107–119. https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1560

Karlina, L. (2021). *Implementasi Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor*

Dprd Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera …. https://www.academia.edu/download/86851669/SKRIPSI_20Gabungan_20Kecuali_20BAB_20V.pdf

Kasman, N. (2022). Penanda Kesantunan Berbahasa pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 274–280. https://doi.org/10.51817/kimli.vi.63

Musi, M. A., Muh. Yusri Bachtiar, Herlina, & Sitti Nurhidayah Ilyas. (2022). Local Wisdom Values of the Bugis Community in Early Childhood Multicultural Learning. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, *10*(2), 255–264. https://doi.org/10.23887/paud.v10i2.50622

Ningrum, W. (2023). *Peran Media Sosial dalam Kampanye Public Relations (The Role of the Media Social in Public Relations Campaigns)*. *December*, 0–17. https://www.researchgate.net/publication/376390421_Peran_Media_Sosial_dalam_Kampanye_Public_Relations_The_Role_of_the_Media_Social_in_Public_Relations_Campaigns

Novianti, D. A., Mahriani, R., & Wulantari, R. A. (2020). Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Kantor Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017). *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 30–39. https://doi.org/10.33369/jkaganga.4.2.30-39

Rahayu, M., Cholisa Hafshah, M. N., & Indriasandi, I. B. (2023). The Cultural Values of Siri' in Bugis Community Represented in Tarung Sarung Film (2020). *Pioneer: Journal of Language and Literature*, *15*(1), 68. https://doi.org/10.36841/pioneer.v15i1.2768

Sasmita, A. N., & Rahaju, T. (2023). Implementasi open Parliament pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Publika*, 1723–1734. https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1723-1734

Summak, M. E. (2024). Kültürel Semboller ve Halkla ilişkiler: Yerel ve Küresel Yaklaşımlar. *International Journal of Social Sciences*, *8*(35), 191–209. https://doi.org/10.52096/usbd.8.35.10

Supa, D. W., & Zoch, L. M. (2022). Media relations today. In *The Routledge Companion to Public Relations* (pp. 177–187). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003131700-17

Tartib, M., & Etty Sri Wahyuni. (2023). Optimizing the Role of the Regional House of Representatives (DPRD) Deliberative Bureau: A Systematic Literature Review. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, *6*(5), 1111–1117. https://doi.org/10.37275/oaijss.v6i5.178

Tavares, J. F. F. (2024). Transparency and accountability in public management. *Accounting and Management Review | Revista de Contabilidade e Gestão*, *28*(1). https://doi.org/10.55486/amrrcg.v28i1.6